

# **KEWENANGAN DOKTER DAN BIDAN DALAM MENYIMPAN OBAT DAN PEMBERIAN OBAT.**

**( PENELITIAN HUKUM PERBANDINGAN TERHADAP UNDANG UNDANG  
NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN  
KEPMENKES NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG REGISTRASI DAN  
PRAKTIK BIDAN )**

**The authority of doktor and midwife in store  
and offer the drugs**



**OLEH  
DETI RAHMAWATI  
05.93.0068**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2007**

# **KEWENANGAN DOKTER DAN BIDAN DALAM MENYIMPAN OBAT DAN PEMBERIAN OBAT.**

**(PENELITIAN HUKUM PERBANDINGAN TERHADAP UNDANG UNDANG  
NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN  
KEPMENKES NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG REGISTRASI DAN  
PRAKTIK BIDAN )**

**The authority of doktor and midwife in store  
and offer the drugs**

## **TESIS**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
DI UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

**OLEH  
DETI RAHMAWATI  
NIM . 05.93.0068**

Persetujuan untuk disidangkan

Pembimbing :

Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi,SH.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNYA, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis yang berjudul “ KEWENANGAN DOKTER DAN BIDAN DALAM MENYIMPAN DAN PEMBERIAN OBAT “. Dalam Penelitian ini menjelaskan kewenangan dokter dan bidan dalam menyimpan dan memberikan obat dilihat dari kajian hukumnya sehingga semua pihak mendapatkan perlindungan hukum. Penulisan Tesis ini untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Starta 2 Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Menyadari akan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan, penulis sangatlah mengharapkan kritik maupun saran yang membangun untuk perbaikan perbaikan Tesis.

Dalam penyusunan Tesis ini , penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan demi tercapainya penulisan tesis ini dengan baik.

Pada kesempatan ini perkenalkan penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. A. Widanti S.,SH.,CN, selaku ketua Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH. Selaku ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Parahyangan Bandung dan Juga selaku pembimbing utama yang secara sungguh sungguh membimbing dan mendiskusikan segala sesuatu dengan baik dalam upaya merampungkan penyusunan Tesis ini.

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang telah memberikan ijin untuk mengikuti pendidikan Stara 2 Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Endang Wahyati,SH,MH dan P. Lindawaty S. Sewu.SH.MHum sebagai Dosen Penguji yang telah banyak membantu dan memberikan saran saran untuk perbaikan penyusunan Tesis ini.

Perkenankan pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulusnya untuk kedua orang tua yang telah banyak mendukung dalam mengikuti pendidikan ini dan kepada suami H. Heri Suherlan Iskandar. dr. MM serta anak anak tercinta R. Derri Hafa Nurfajri dan R. Geri Raja Nashavid yang telah banyak sekali mendorong, memberikan semangat dan doa selama penulis mengikuti pendidikan Magister Hukum Kesehatan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini. Terakhir penulis mengharapkan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak..

Bandung, Januari 2007.

Penulis,

Deti Rahmawati

## ABSTRAK

Tenaga kesehatan dalam mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan profesinya sehingga berwenang untuk melakukan upaya kesehatan yang sesuai dengan kompetensi. Kewenangan dokter dan bidan dalam menyimpan dan memberikan obat dalam pelayanan kesehatan menimbulkan beberapa persepsi yang berbeda beda di lapangan sehingga perlu lebih lanjut dibahas mengenai kewenangan tersebut dilihat dari kajian hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normative jenis perbandingan. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Meneliti masalah normative, membuat perbandingan antar fenomena dan melihat hubungan sebab akibat. Sistematik penulisan terdiri dari lima bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti.

Ilmu farmasi dari dahulu mengalami perkembangan yang sangat pesat hal ini berhubungan dengan kebutuhan manusia akan manfaat obat dalam penyembuhan penyakitnya sehingga banyak ditemukan formulasi obat yang baru. Maka diperlukan suatu farmakope untuk menjadikan pedoman dalam pembuatan obat-obatan dan dibuat klasifikasi obat agar mudah dalam pengawasan, pembinaan di lapangan. Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai mutu, kemanfaatan dan keamanan obat agar dapat melindungi masyarakat. Kewenangan penyimpanan obat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998.

Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian harus tenaga kesehatan yang berwenang untuk itu akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang dokter berwenang menyimpan obat dengan jenis dan jumlah yang diijinkan dan menyerahkan obat apabila berada di daerah terpencil, tidak ada apotik di wilayah tersebut. Meskipun hal ini tidak ditindak lanjuti dengan petunjuk teknisnya.

Bidan melakukan pelayanan kebidanan yaitu pelayanan profesional yang melayani pelayanan kesehatan kepada ibu dalam kurun waktu masa reproduksi dan bayi baru lahir. Dalam pelayanan kebidanan diperlukan obat-obatan dan kewenangan bidan dalam menyimpan obat diatur dalam Kepmenkes Nomor 900/Menkes/S/VII/2002.

Dengan penjelasan diatas maka terdapat perbedaan kewenangan dokter dan bidan dalam menyimpan dan pemberian obat. Yang dapat menyebabkan perbedaan tersebut adalah pendidikan, peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan tersebut serta kurikulum farmasi dipendidikan yang disesuaikan dengan fungsi dan kompetensinya.

## ABSTRACT.

Personnel Health in devoted them self in health service have to have skill and knowledge matching with its authoritative profession so that to strive health matching with their competence. Doktor authority ang midwife in store and offer drug in health service generate some different perception in field so that need furthermore debated to concerning the authority seeing from its law study.

Research method is using descriptive research with approach comparison type with Juridical Normative Method. The technical data collecting used secondary data from materials punish primary, secondary and tertiary. Examine carefully the problem of normative, making comparison between phenomenons and seeing the causality. Writing systematic way consist of five chapter utilize to clarify accurate promlems coverage and scope.

Pharmacology from beginning experience growth, this matter relates to requirement of benefit human being will medicines in healing of its disease so that many of it finding new drug formulation. Hence needed by a pharmacopoeia to make directive in making medicines and made classification medicines so that to be easy to observation and construction in its range. The government makes regulation regarding to hit quality of security and benefit medicines so that can be protected the society. The Authority of drug store arranged in Governmental Regulation Of Number 72 Year 1998.

In Medicare legislation Number 23 Year 1992 in charge to conduct work of Health Personnel pharmacy have to in charge for that however rising of Law Numner 29 Year 2004 about Doctor Practice, an authoritative doctor in store medicines with permitted amount and type and deliver drug if residing in purlieus, there is no dispensary in the region. Though this matter do not be acted by continued with technical guide.

Midwife conducted midwifery service is professional service which serves health service to mother in range of time a period to newborn baby and reproduction. In midwifery service in needing midwife authority and drug in keep medicines in arranging in Kepmenkes Number 900/Menkes/SK/VII/2002.

With clarification above hence there are difference authority between doctor and midwife in store and affer of drug able to cause the difference of education, regulation arranging the authority and also pharmacy curriculum in adapted for by education function and its interest.

## DAFTAR ISI

|  | Hal |
|--|-----|
| ABSTRAK .....                                      | i   |
| ABSTRACT .....                                     | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                   | iii |
| KATA PENGANTAR .....                               | vi  |
| BAB I      PENDAHULUAN .....                       | 1   |
| A. LATAR BELAKANG .....                            | 1   |
| B. PERUMUSAN MASALAH .....                         | 6   |
| C. TUJUAN PENELITIAN .....                         | 6   |
| D. METODE PENELITIAN .....                         | 7   |
| E. TEHNIK PENGUMPULAN DATA .....                   | 8   |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN .....                     | 10  |
| BAB II      OBAT DAN PENYIMPANAN OBAT.....         | 12  |
| A. PENGANTAR .....                                 | 12  |
| B. PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI OBAT .....           | 14  |
| C. KEWENANGAN PENYIMPANAN OBAT.....                | 24  |
| D. PENUTUP .....                                   | 30  |
| BAB III      KEWENANGAN DOKTER MENYIMPAN OBAT..... | 33  |
| A. PENGANTAR.....                                  | 33  |
| B. PROFESI DOKTER .....                            | 34  |
| C. KEWENANGAN DOKTER MENYIMPAN OBAT.....           | 44  |
| D. PENUTUP.....                                    | 50  |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| BAB IV | KEWENANGAN BIDAN MENYIMPAN OBAT.....    | 52 |
|        | A. PENGANTAR .....                      | 52 |
|        | B. PROFESI BIDAN .....                  | 54 |
|        | C. KEWENANGAN BIDAN MENYIMPAN OBAT..... | 64 |
|        | D. PENUTUP.....                         | 68 |

|      |   |    |
|------|---|----|
| BABV | KEWENANGAN DOKTER DAN BIDAN DALAM<br>MENYIMPAN DAN MEMBERIKAN OBAT .....                          | 70 |
|      | A. PENGANTAR.....   | 70 |
|      | B. PERBEDAAN KEWENANGAN DOKTER DAN BIDAN<br>DALAM MENYIMPAN DAN MEMBERIKAN OBAT.....              | 73 |
|      | C. PENYEBAB PERBEDAAN KEWENANGAN DOKTER<br>DAN BIDAN DALAM MENYIMPAN DAN MEMBERIKAN<br>OBAT ..... | 82 |
|      | D. PENUTUP.....   | 88 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN